

Politisasi Agama dan Politik Identitas *Politicization of Religion and Identity Politics*

Ridwan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: ridwanibnhambali@stiba.ac.id

Musafir Pababbari

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: musafirs3@gmail.com

Article Info

Received : 12 January 2025
Revised : 14 January 2025
Accepted : 15 January 2025
Published : 1 February 2025

Keywords: *religious politicization, identity politics, democracy*

Kata kunci: *politisasi agama, politik identitas, demokrasi*

Abstract

Religious politicization is a significant phenomenon in Indonesia's political dynamics, where religious symbols, values, and institutions are utilized for political purposes. This study aims to analyze the impact of religious politicization on Indonesia's democratic processes, particularly in terms of voter participation, social polarization, and public policy. Additionally, it explores strategies and measures that can be implemented by the government, society, and civil organizations to mitigate the negative effects of religious politicization and create a fair and inclusive election process. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical method, the study concludes that religious politicization exacerbates social fragmentation, diminishes trust in political institutions, and shifts focus away from substantive issues. Therefore, collective actions such as political education, campaign regulation, and the promotion of interfaith dialogue are necessary to prevent the exploitation of religion in politics. These efforts are expected to ensure that democracy in Indonesia operates in a healthy and harmonious manner.

Abstrak

Politisasi agama merupakan fenomena yang signifikan dalam dinamika politik Indonesia, di mana simbol-simbol, nilai-nilai, dan institusi keagamaan digunakan untuk tujuan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politisasi agama terhadap pesta demokrasi di Indonesia, khususnya dalam aspek partisipasi pemilih, polarisasi sosial, dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi strategi dan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil untuk mengurangi pengaruh negatif politisasi agama, serta menciptakan proses pemilihan yang adil dan inklusif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menyimpulkan bahwa politisasi agama dapat memperburuk fragmentasi sosial, menurunkan kepercayaan terhadap institusi politik, dan mengalihkan fokus dari isu-isu

substansif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kolektif seperti edukasi politik, regulasi kampanye, dan promosi dialog antaragama untuk mencegah eksploitasi agama dalam politik. Dengan upaya tersebut, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berjalan secara sehat dan harmonis.

How to cite: Ridwan, Musafir Pababbari. "Politisasi Agama dan Politik Identitas", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 125-136. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2025, Ridwan, Musafir Pababbari



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Politisasi agama merujuk pada proses di mana nilai-nilai, simbol-simbol, dan institusi keagamaan dimanfaatkan untuk tujuan politik. Fenomena ini telah menjadi isu krusial di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana keberagaman agama dan identitas menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan politik. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan berbagai kelompok agama lainnya, menjadikan politisasi agama sebagai faktor penting dalam dinamika politiknya¹.

Dalam konteks Indonesia, politisasi agama sering kali terwujud melalui pemanfaatan simbol-simbol agama oleh partai politik atau kandidat tertentu untuk meraih dukungan suara. Taktik ini sering kali berfungsi untuk memperkuat identitas kelompok, memobilisasi massa, dan menciptakan narasi yang menyentuh aspek emosional masyarakat². Misalnya, dalam kampanye pemilu, simbol-simbol agama, seperti penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an atau jargon-jargon yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan, sering digunakan untuk menarik simpati pemilih. Masyarakat yang merasa identitas agama mereka direpresentasikan akan cenderung memberikan dukungan kepada kandidat atau partai yang memiliki kesamaan nilai³.

Namun, efek dari pendekatan ini tidak selalu positif. Mobilisasi suara berdasarkan identitas agama dapat mengakibatkan fragmentasi sosial, di mana masyarakat terpecah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, saling bersaing satu sama lain. Fragmentasi ini tidak hanya mengurangi rasa solidaritas antarwarga, tetapi juga menciptakan garis pemisah yang semakin tajam antara kelompok-kelompok agama⁴. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan antar kelompok, menciptakan suasana permusuhan, dan mengakibatkan konflik yang berpotensi merusak harmoni sosial yang telah dibangun selama bertahun-

¹ Abdillah Halim, "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 2 (2018): 231-59.

² Siti Faridah and Jerico Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, 2018, 489-506.

³ Mohammad Supriyadi, "Politisasi Agama Di Ruang Publik: Komunikasi SARA Dalam Perdebatan," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 3 (2015): 317-426.

⁴ Idrus Ruslan, "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 161-72.

tahun⁵. Contoh nyata dari dampak ini dapat terlihat dalam beberapa insiden kerusakan yang terjadi di daerah-daerah tertentu, di mana ketegangan antar komunitas agama meningkat, seringkali dipicu oleh retorika politik yang divisif.

Pemilu sebagai sarana demokrasi diharapkan dapat berlangsung dengan adil dan transparan, memberikan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, politisasi agama sering kali memunculkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi⁶. Ketika agama digunakan sebagai alat politik, perdebatan yang seharusnya berfokus pada isu-isu kebijakan dan kesejahteraan publik sering kali terabaikan. Sebaliknya, politik identitas mendominasi diskusi, sehingga isu-isu substansial seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi terpinggirkan. Dalam konteks ini, politik menjadi arena bagi pertarungan ideologis dan identitas yang sering kali mengesampingkan kepentingan bersama.

Dalam jangka panjang, politisasi agama berpotensi merusak legitimasi institusi politik dan memperburuk kepercayaan publik terhadap proses demokrasi⁷. Masyarakat yang semakin skeptis terhadap niat politisi dan lembaga-lembaga negara dapat menurunkan tingkat partisipasi politik dan memicu apatisme, yang pada akhirnya melemahkan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari berbagai elemen masyarakat – termasuk pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan individu – untuk mendorong praktik politik yang lebih inklusif dan berfokus pada kepentingan umum, ketimbang identitas sempit yang mengedepankan agama.

Dengan demikian, penting untuk menciptakan kesadaran akan konsekuensi negatif dari politisasi agama dan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dalam memilih pemimpin. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana agama seharusnya dijadikan pedoman moral dalam kehidupan masyarakat, bukan alat untuk manipulasi politik, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan kerukunan dan harmoni sosial, sambil memperkuat fondasi demokrasi yang sehat.

Lebih jauh lagi, politisasi agama dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Ketika agama dipolitisasi, masyarakat mungkin merasa bahwa pemimpin dan partai politik tidak lagi bertindak demi kepentingan publik, melainkan untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka sendiri. Hal ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dan menurunkan legitimasi proses pemilu⁸.

Selain itu, dampak dari politisasi agama tidak hanya terasa saat pemilu, tetapi juga berlanjut dalam kebijakan publik setelah pemilihan⁹. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih dapat dipengaruhi

⁵ Ibid.

⁶ Riki Ronaldo and Darmaiza Darmaiza, "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 33–48.

⁷ Faridah and Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu."

⁸ Ruslan, "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik."

⁹ Budi Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 133–54.

oleh kepentingan kelompok agama tertentu, yang mengarah pada diskriminasi atau marginalisasi terhadap kelompok lain¹⁰. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana politisasi agama berpengaruh dalam konteks yang lebih luas dan bagaimana hal ini dapat diatasi.

Dengan semua tantangan yang dihadapi, penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna menghilangkan politisasi agama dalam proses pemilihan umum. Dalam makalah ini, penulis akan membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, penulis berfokus pada dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana dampak politisasi agama terhadap pesta demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang tepat untuk menghilangkan politisasi agama saat pemilihan umum?

Dalam rumusan masalah pertama, makalah ini akan menganalisis pengaruh politisasi agama terhadap partisipasi pemilih, polarisasi sosial, dan kebijakan publik yang dihasilkan selama pemilihan umum. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua, penulis akan mengeksplorasi berbagai strategi dan langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil untuk mengurangi pengaruh negatif politisasi agama dalam proses pemilihan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak politisasi agama terhadap pesta demokrasi di Indonesia, khususnya dalam hal partisipasi pemilih, polarisasi sosial, dan kebijakan publik yang dihasilkan selama proses pemilihan umum. Dengan memahami pengaruh politisasi agama, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi upaya-upaya yang tepat untuk menghilangkan atau meminimalkan pengaruh negatifnya. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji berbagai strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil guna memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, inklusif, dan demokratis tanpa adanya eksploitasi isu-isu keagamaan untuk kepentingan politik tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Islam terhadap pengucapan salam kepada penganut agama lain, serta dampaknya terhadap dakwah Islam. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas berkaitan dengan norma-norma agama dan sosial yang perlu dianalisis secara komprehensif, terutama dalam konteks masyarakat yang pluralistik.

¹⁰ Ronaldo and Darmaiza, "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019."

2. PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Umum Politisasi Agama dan Politik Identitas

Politisasi agama dapat didefinisikan sebagai proses di mana ajaran, simbol, dan institusi keagamaan digunakan untuk tujuan politik tertentu. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi alat untuk memobilisasi dukungan politik¹¹. Politisasi agama terjadi ketika aktor politik mengadopsi nilai-nilai agama untuk mempengaruhi keputusan publik, membangun basis dukungan, atau menyokong agenda tertentu.

Fenomena ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari retorika politik yang menekankan nilai-nilai keagamaan, hingga penciptaan kebijakan publik yang mencerminkan interpretasi tertentu terhadap ajaran agama. Politisasi agama sering kali memunculkan kekhawatiran mengenai objektivitas dan independensi institusi keagamaan, serta dampaknya terhadap kebebasan beragama dan pluralisme¹².

Politik identitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik dan strategi politik yang berfokus pada identitas kelompok tertentu, termasuk agama, etnisitas, gender, dan kelas¹³. Dalam konteks Indonesia, politik identitas sering kali berakar pada dinamika sosial yang kompleks, di mana berbagai kelompok mencoba untuk menegaskan keberadaan dan kepentingan mereka dalam arena politik.

Politik identitas memungkinkan kelompok-kelompok tertentu untuk mengekspresikan aspirasi dan kebutuhan mereka secara kolektif, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan antara kelompok yang berbeda¹⁴. Dalam konteks ini, agama sering kali menjadi komponen utama dari identitas kelompok, dan digunakan untuk membangun solidaritas dan mobilisasi¹⁵. Namun, ketika politik identitas menjadi dominan, hal ini dapat menyebabkan polarisasi yang merugikan, di mana perbedaan di antara kelompok menjadi lebih menonjol daripada kesamaan yang ada¹⁶.

Hubungan antara politisasi agama dan politik identitas sangat erat, di mana keduanya saling mempengaruhi. Ketika agama digunakan sebagai alat untuk

¹¹ Halim, "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)."

¹² Noor Achmad, "Politisasi Agama Di Era Digital Dan Penanganannya," *Prosiding Senaspolhi* 1, no. 1 (2018).

¹³ Hery Prasetyo, Dien Vidia Rosa, and Rosnida Sari, "Beradab Dengan Adat: Politik Identitas Dalam Ritualitas Agama Masyarakat Tengger," *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 2 (2023): 124–30.

¹⁴ Osbin Samosir and Indah Novitasari, "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 3 (2022): 332–46.

¹⁵ Dina Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia," *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.

¹⁶ I Putu Sastra Wingarta et al., "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24.

memobilisasi dukungan politik, identitas agama menjadi semakin penting dalam politik identitas¹⁷. Hal ini dapat mengarah pada pergeseran fokus dari isu-isu substansial yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan, menuju isu-isu yang lebih sektarian dan identitas berdasarkan agama.

Studi oleh Lestari¹⁸ menunjukkan bahwa politisasi agama di Indonesia sering kali terhubung dengan aspirasi politik identitas, yang mengarah pada fragmentasi sosial dan meningkatnya ketegangan antar kelompok. Dalam konteks ini, pilihan politik tidak lagi didasarkan pada platform atau kebijakan, tetapi lebih pada afiliasi identitas yang dibangun di atas agama.

2.2. Dampak Politisasi Agama terhadap Pesta Demokrasi di Indonesia

2.2.1. Fragmentasi Sosial

Salah satu dampak paling signifikan dari politisasi agama di Indonesia adalah fragmentasi sosial yang terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Mobilisasi suara berdasarkan identitas agama dapat menyebabkan terbentuknya garis pemisah yang jelas antara kelompok-kelompok yang berbeda¹⁹. Hal ini tidak hanya mengurangi solidaritas sosial, tetapi juga meningkatkan ketegangan di antara kelompok yang memiliki keyakinan dan latar belakang yang berbeda. Dalam konteks pemilihan umum, fragmentasi ini dapat berujung pada polarisasi yang merugikan, di mana dialog antar kelompok semakin sulit tercipta.

Ketika agama dijadikan alat politik, aspirasi politik individu atau kelompok sering kali lebih dipengaruhi oleh afiliasi agama daripada isu-isu substansial, seperti ekonomi atau pendidikan. Sebagai contoh, dalam pemilu 2019, mobilisasi suara berbasis agama terlihat jelas, di mana beberapa kandidat menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu. Hal ini menciptakan kondisi di mana pemilih cenderung memilih berdasarkan identitas agama daripada visi dan misi yang ditawarkan oleh calon pemimpin.

2.2.2. Intoleransi dan Diskriminasi

Politisasi agama juga dapat memicu intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dalam usaha untuk memobilisasi dukungan, aktor politik sering kali menyebarkan narasi yang mengarah pada demonisasi kelompok lain, yang berpotensi menimbulkan sentimen anti-agama atau anti-ras. Taktik ini berfungsi untuk memperkuat soliditas basis dukungan mereka, tetapi pada saat yang sama, menciptakan ketegangan yang dapat berujung pada konflik sosial²⁰.vvpoliti

¹⁷ Firdaus M Yunus, Taslim H M Yasin, and Syamsul Rijal, "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. 2 (2023): 121–37.

¹⁸ Lestari, "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia."

¹⁹ Wasisto Raharjo Jati, "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 133–56.

²⁰ Faridah and Mathias, "Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu."

Misalnya, dalam beberapa kasus, pemilihan umum di Indonesia telah disertai dengan kampanye negatif yang menargetkan kelompok agama tertentu. Hal ini dapat merugikan reputasi kelompok-kelompok tersebut, serta menurunkan rasa saling percaya di antara komunitas yang berbeda. Diskriminasi ini dapat berdampak tidak hanya pada hasil pemilu, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang menderita akibat ketegangan sosial.

2.2.3. Penurunan Kualitas Demokrasi

Politisasi agama berpotensi menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika identitas agama menjadi faktor utama dalam pemilihan umum, isu-isu substantif seperti kebijakan publik, transparansi, dan akuntabilitas sering kali terabaikan. Dalam konteks ini, pemilih mungkin lebih terfokus pada identitas dan afiliasi agama daripada pada platform politik yang lebih luas²¹.

Sebagai contoh, ketika politisasi agama mendominasi kampanye pemilu, diskusi tentang isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi terpinggirkan. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas debat publik, tetapi juga berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian oleh Ronaldo and Darmaiza²² menunjukkan bahwa kandidat yang lebih mengandalkan simbol-simbol agama dalam kampanye mereka sering kali lebih berhasil, meskipun tidak memiliki kebijakan yang jelas atau program yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.4. Erosi Kepercayaan Terhadap Institusi

Ketika politisasi agama menjadi hal yang umum dalam proses pemilihan umum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik juga dapat terpengaruh. Masyarakat mungkin merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih tidak lagi mencerminkan kepentingan publik, melainkan lebih condong kepada kelompok-kelompok agama tertentu²³. Hal ini dapat mengakibatkan apatisme politik, di mana masyarakat kehilangan minat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Erosi kepercayaan ini dapat mengurangi partisipasi pemilih dalam pemilu berikutnya, serta mengurangi legitimasi institusi politik secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam pemilu 2019, terdapat penurunan partisipasi pemilih di beberapa daerah yang dilanda ketegangan antar kelompok agama, menunjukkan bahwa polarisasi dapat menghambat partisipasi demokratis.

²¹ Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi."

²² Ronaldo and Darmaiza, "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019."

²³ Frenki Frenki, "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 29-48.

Dampak politisasi agama terhadap pesta demokrasi di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Dari fragmentasi sosial hingga penurunan kualitas demokrasi, semua ini menunjukkan bahwa politisasi agama tidak hanya memengaruhi proses pemilu, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi politisasi agama dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan proses demokrasi.

2.3. Upaya untuk Menghilangkan Politisasi Agama saat Pemilihan Umum

2.3.1. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Politik

Salah satu langkah penting untuk mengurangi politisasi agama adalah melalui edukasi dan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Program-program pendidikan yang fokus pada pemahaman tentang demokrasi, hak-hak politik, dan keberagaman sosial perlu diperkenalkan di berbagai tingkat, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi²⁴. Edukasi ini dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menganalisis isu-isu politik, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh mobilisasi berbasis agama.

Selain itu, kampanye kesadaran tentang bahaya politisasi agama dalam politik identitas dapat dilakukan melalui media massa dan platform digital. Dengan mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi negatif dari politisasi agama, diharapkan mereka akan lebih memilih calon pemimpin yang fokus pada isu-isu kebijakan substantif ketimbang identitas agama.

2.3.2. Regulasi dan Pengawasan dalam Kampanye Politik

Pentingnya regulasi yang ketat dalam kampanye politik juga tidak dapat diabaikan. Pemerintah dan lembaga pengawas pemilu perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam kampanye²⁵. Hal ini termasuk pembatasan terhadap iklan politik yang menekankan identitas agama, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kampanye yang mengandung unsur-unsur diskriminatif atau intoleran.

Lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus proaktif dalam menindak pelanggaran yang berkaitan dengan politisasi agama. Ini bisa meliputi sanksi bagi kandidat atau partai politik yang menggunakan isu-isu agama untuk memobilisasi dukungan atau menyerang lawan politik. Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif, diharapkan pemilu dapat berlangsung lebih adil dan transparan.

²⁴ Andika Hariyanto Surbakti et al., "Edukasi Dan Sosialisasi Demokrasi Dan Politik Indonesia," *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam* 3, no. 1 (2023): 28–33.

²⁵ Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, and Firman Manan, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (2021): 120–27.

2.3.3. Dialog Antar Agama dan Penguatan Toleransi

Upaya untuk mengurangi politisasi agama juga memerlukan penguatan dialog antar agama dan toleransi di masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang mendorong interaksi antara kelompok-kelompok dengan latar belakang agama yang berbeda dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik²⁶. Forum-forum diskusi dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan mengurangi stigma negatif terhadap kelompok lain.

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memfasilitasi dialog antar agama ini. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kerukunan antar umat beragama, diharapkan masyarakat akan lebih menerima perbedaan dan menolak penggunaan agama sebagai alat untuk memecah belah.

2.3.4. Peran Media dalam Mencegah Politisasi Agama

Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah politisasi agama. Melalui pemberitaan yang berimbang dan informatif, media dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami konteks politik dan menilai calon pemimpin secara objektif. Jurnalis dan media massa perlu diingatkan tentang tanggung jawab mereka dalam melaporkan isu-isu politik yang sensitif, termasuk yang berkaitan dengan agama²⁷.

Kampanye media yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap perbedaan juga dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi politisasi agama. Media sosial, sebagai platform komunikasi yang luas, dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun kesadaran di kalangan masyarakat.

2.3.5. Keterlibatan *Civil Society* dan Organisasi Non-Pemerintah

Civil society dan organisasi non-pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan mengadvokasi pengurangan politisasi agama dalam pemilu. Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik tanpa mengedepankan identitas agama.

Organisasi ini dapat melakukan penelitian, menyusun laporan, dan menyebarluaskan informasi mengenai dampak politisasi agama terhadap demokrasi. Selain itu, mereka juga dapat menyelenggarakan seminar dan workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya

²⁶ Margarith I Loho and Meily M Wagiu, "Penguatan Moderasi Beragama Melalui Dialog Antar Umat Beragama," *DEDICATIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 78–87.

²⁷ Achmad Solechan, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Muhammad Syauqillah, "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024: The Role of Religious Counselor in Preventing the Politization of Religion Toward the 2024 Political Year," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 487–505.

memilih berdasarkan kebijakan dan visi calon pemimpin, bukan hanya identitas agama.

Oleh karena itu, menghilangkan politisasi agama saat pemilihan umum adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multifaset. Melalui edukasi, regulasi, dialog antar agama, peran media, dan keterlibatan civil society, diharapkan kondisi sosial-politik di Indonesia dapat lebih baik dan pemilu dapat berlangsung dengan adil serta transparan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan berdaya.

3. KESIMPULAN

Politisasi agama dan politik identitas merupakan fenomena yang kompleks dan signifikan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, penggunaan simbol-simbol keagamaan dalam arena politik telah terbukti memengaruhi dinamika sosial, memperburuk fragmentasi masyarakat, dan mengganggu kualitas pemilihan umum. Dampak-dampak negatif dari politisasi agama, seperti meningkatnya intoleransi, penurunan kepercayaan terhadap institusi politik, dan pengabaian isu-isu substantif, menunjukkan betapa pentingnya isu ini untuk dibahas dan dicari solusinya.

Di satu sisi, politisasi agama dapat memobilisasi dukungan dari segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, praktik ini sering kali mengabaikan kepentingan umum dan berpotensi menciptakan konflik di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika identitas agama menjadi faktor utama dalam pemilu, terjadi pengalihan perhatian dari isu-isu penting yang seharusnya menjadi fokus dalam proses demokrasi, seperti kebijakan publik, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah upaya perlu dilakukan. Edukasi politik kepada masyarakat, regulasi yang ketat dalam kampanye politik, dan promosi dialog antar agama adalah langkah-langkah penting yang dapat mengurangi politisasi agama. Selain itu, peran media dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam membangun kesadaran dan memperkuat toleransi di antara kelompok-kelompok berbeda. Akhirnya, untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan inklusif, semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, media, dan organisasi masyarakat sipil, harus bekerja sama. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan bahwa pemilihan umum dapat berlangsung secara adil dan transparan, tanpa intervensi yang merugikan dari politisasi agama. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Noor. "Polarisasi Agama Di Era Digital Dan Penanganannya." *Prosiding Senaspolhi* 1, no. 1 (2018).
- Faridah, Siti, and Jerico Mathias. "Polarisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa Dalam Pemilu." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*,

- 4:489–506, 2018.
- Frenki, Frenki. "Analisis Politisasi Identitas Dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 29–48.
- Halim, Abdillah. "Fatwa Dan Politisasi Agama (Analisis Wacana Penggunaan Fatwa Pada Pilkada DKI Jakarta)." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5, no. 2 (2018): 231–59.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Agama Dan Politik: Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 133–56.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 133–54.
- Lestari, Dina. "Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 12–16.
- Loho, Margarith I, and Meily M Wagiu. "Penguatan Moderasi Beragama Melalui Dialog Antar Umat Beragama." *DEDICATIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 78–87.
- Prasetyo, Hery, Dien Vidia Rosa, and Rosnida Sari. "Beradab Dengan Adat: Politik Identitas Dalam Ritualitas Agama Masyarakat Tengger." *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)* 1, no. 2 (2023): 124–30.
- Ronaldo, Riki, and Darmaiza Darmaiza. "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 33–48.
- Ruslan, Idrus. "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 18, no. 2 (2014): 161–72.
- Samosir, Osbin, and Indah Novitasari. "Hak Politik Warga Negara Dalam Cengkeraman Politik Identitas: Refleksi Menuju Pemilu Serentak Nasional Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 3 (2022): 332–46.
- Solechan, Achmad, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Muhammad Syauquillah. "Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024: The Role of Religious Counselor in Preventing the Politization of Religion Toward the 2024 Political Year." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 487–505.
- Supriyadi, Mohammad. "Politisasi Agama Di Ruang Publik: Komunikasi SARA Dalam Perdebatan." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 3 (2015): 317–426.
- Surbakti, Andika Hariyanto, Sungkawati Kardi Wahyuningsih, Muhammad Hasyimsyah Batubara, Ratih Ratih, Mentari Anggita Br Ginting, and Nurmalina Nurmalina. "Edukasi Dan Sosialisasi Demokrasi Dan Politik Indonesia." *JPMA-Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam* 3, no. 1 (2023): 28–33.
- Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, and Firman Manan. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah."

PERSPEKTIF 10, no. 1 (2021): 120-27.

Wingarta, I Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117-24.

Yunus, Firdaus M, Taslim H M Yasin, and Syamsul Rijal. "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. 2 (2023): 121-37.